

ABSTRAK

Pesatnya digitalisasi transaksi mendorong platform e-commerce seperti Tokopedia untuk menerapkan kebijakan privasi sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan data pribadi pengguna. Keabsahan hukum dan perlindungan hak pengguna dalam kebijakan tersebut masih menimbulkan pertanyaan, terutama mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban pengguna dan platform. Dominasi posisi platform dalam merumuskan ketentuan secara sepihak menjadikan isu ini krusial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji kesesuaian kebijakan privasi Tokopedia terhadap prinsip perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian bertujuan untuk menilai keabsahan kebijakan privasi Tokopedia serta mengevaluasi ketersediaan perlindungan hukum bagi pengguna dalam hal kebocoran data pribadi. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan privasi Tokopedia secara formil telah memenuhi unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Substansinya masih mengandung ketimpangan posisi tawar karena tidak memberi ruang bagi pengguna untuk menegosiasikan ketentuan pemrosesan data, dan memuat klausul yang cenderung menguntungkan platform. Dalam hal pertanggungjawaban atas kebocoran data, pengguna dapat merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 46 UU PDP. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan privasi Tokopedia telah sah secara hukum, namun masih perlu penyesuaian substansi agar selaras dengan prinsip keadilan kontraktual, terutama terkait mekanisme persetujuan dan ganti rugi.

Kata kunci: kebijakan privasi, keabsahan perjanjian, perlindungan data pribadi, e-commerce, Tokopedia.

ABSTRACT

The rapid digitalization of transactions has driven e-commerce platforms such as Tokopedia to implement privacy policies as legal instruments for managing users' personal data. The legal validity and the protection of users' rights within such policies remain questionable, particularly concerning the balance between the rights and obligations of users and platforms. The dominant position of platforms in unilaterally formulating binding provisions makes this issue critical. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to examine the compliance of Tokopedia's privacy policy with contractual principles under the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), the Consumer Protection Law, and the Personal Data Protection Law (UU PDP). The study aims to assess the legal validity of Tokopedia's privacy policy and evaluate the availability of legal protection for users in cases of personal data breaches. The findings show that, formally, Tokopedia's privacy policy fulfills the essential elements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, the substance reflects an imbalance in bargaining power as it offers no opportunity for users to negotiate data processing terms and includes clauses that tend to benefit the platform unilaterally. In terms of liability for data breaches, users may refer to Article 1365 of the Civil Code concerning unlawful acts and Article 46 of the PDP Law, which provides for the right to compensation. Based on these findings, it can be concluded that although Tokopedia's privacy policy is legally valid, its substance requires adjustments to align with the principles of contractual fairness, particularly regarding consent mechanisms and compensation procedures.

Keywords: privacy policy, validity of contracts, personal data protection, e-commerce, Tokopedia.